

eksplorasi

by Ery Supriyadi

Submission date: 18-Jul-2020 09:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 1358864253

File name: 2010_Co-Value_Ery_Kajian_Eksplorasi.pdf (1.19M)

Word count: 6438

Character count: 43383

CO-VALUE

JURNAL EKONOMI, KOPERASI & KEWIRAUSAHAAN

Vol. 1 No. 1/Januari 2010

ISSN : 2096-3306

GRAH BUNTAI ARIFIN

Inventarisasi Masalah-masalah

Pengembangan Koperasi

dan UKM

(Studi Kasus Arifin)

Peranan Koperasi Dalam Upaya

Meningkatkan SWU Usaha dan

Efisiensi Usaha Anggota

(Studi Kasus)

Implementasi Perhitungan

Promosi Ekonomi Anggota

Sebagai Dasar Evaluasi

Kinerja Koperasi

(Studi Kasus di Kota Semarang)

Kajian Kapasitas Koperasi

Energi dan Apresiasi :

Pemikiran Peluang

dan Tantangan

(A Long Journey from 1945 to 2010)



CO-VALUE

Jurnal Ekonomi, Koperasi & kewirausahaan

Ditributkan oleh:
Program Studi Manajemen
Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

- Peindung** : Rektor IKOPIN
(Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si)
- Penasihat** : Wakil Rektor I Bidang Akademik
(Drs. H. Dindin Barhanudin, M.Sc)
Wakil Rektor II Bidang Kerjasama
(Ir. H. Indra Fahmi, M.Si)
Wakil Rektor III Bidang Administrasi SDM, Keuangan, RTP, Humas
dan Umum.
(Drs. Adeng Kasnir, M.Si)
- Pembina** : Ketua Program Studi Manajemen
(Ir. Hj. Yunita Indriani, M.Si)
- Redaksi Ahli** : Prof. Dr. Des. H. RM. Romul Aifin, MGI (KOPIN)
Prof. Dr. H. Yuyun Wirasmita, MSc. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Tupahwana Priatna Sendjaja. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Burhan Arif (UNPAD)
Prof. Dr. Faisal Alif, Spec.Lic. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. H. Rusdi, MS. (UNPAD)
Prof. Dr. Hj. Ina Primiana, SE, MSIE. (UNPAD)
Prof. Dr. Ir. Hakim Malesan. (ITB)
Dr. H. Sugyanto, SE.,MSc (KOPIN)
Dr. Ir. H. Ery Supriyadi, MT. (KOPIN)
- Pemimpin Redaksi** : Drs. Wahyudin, NT
Wakil Pemimpin Redaksi : Drs. Eka Setijabrata, MGI
Anggota : Ir. Nurhayati Indra, MSc
Drs. Sukmahadi, Ak, MS
- Tata Usaha dan Sirkulasi** : Sri Hidayati, S.Sos
Dedi Mulyadi

Kantor Redaksi

Gedung Program Studi Manajemen IKOPIN LL2
Jl. Raya Jatihangor Km. 20,5 Bandung Telp. (022) 7798179 Fax. (022) 7796033
e-mail : co-value@ikopin.ac.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	_____
Pengantar Redaksi	_____
Inventarisasi Masalah	Oleh: Prof. Dr. H
Pembangunan dan	Oleh: Drs. Aden
Fungsi Koperasi Di	Oleh: Nurhayati I
Penyajian Laporan	Oleh: Sukmahadi
Identifikasi Faktor-F	Oleh: Des. Wahy
Kajian Pelaksanaan	Oleh: Dra. Lily I
Kajian Eksplorasi K	Oleh: Dr. Ir. H. E
Faktor-faktor Pany	KSPUPS Koperasi
	Oleh: Floet Selia

CATATAN UNTUK P

CO-VALUE Jurnal i
forum pembalasan
pembangunan, kea
mungkinan para i
vritasi, hasil peneliti
dan pengembangan i
Indonesia atau ling
kata, dalam lingk
diyakini riwayat p
pedidikan riwayat
pendidikan, litera
atau bahan dan me
produksi lebih dan m
grafik harus diper
penelitian lain da
Salama pertama B
Fruit Manajemen &
Bandung Jawa Bar
www.ikopin.ac.id

4-3-2010

DAFTAR ISI

387/1/1/2

Daftar Isi	1
Pengantar Redaksi	2
Inventarisasi Masalah-masalah Pengembangan Koperasi dan UKM Oleh: Prof. Dr. H.R.M. Ramudi Arlin	3
Pembangunan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Mitra Oleh: Drs. Adeng Kiemat, M.Si dan Summy Amran, SH, MH	7
Fungsi Koperasi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha dan Efisiensi Usaha Anggota Oleh: Nurhayat Indra, Ir, MSc	20
Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota Sebagai Pengabdian Masyarakat Koperasi Oleh: Sukmahadi, SE, Ak, M.Si, dan Eka Setiastika, SE, M.Si	30
Identifikasi Faktor-faktor Dominan Sebagai Motivasi untuk Menjadi Anggota Koperasi Oleh: Drs. Wahyudin, MT	36
Kajian Pelaksanaan Penyakuran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Barat Oleh: Dra. Lely Savitri Dewi, SE, M.Si, dan Ir. H. Indra Fahri, M.Si	43
Kajian Eksplorasi Koperasi Energi dan Koperasi Wisata: Pemikiran, Peluang dan Tantangan Oleh: Dr. Ir. H. Ery Supriyadi R. MT, dan Agus Arlin, SE, Ak, M.Si	49
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pinjaman Bermasalah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja KSP/UPS Koperasi Oleh: Rizki Setiawati, SE, M.Gi dan Iwan Mulyana, SE, M.Si	59



CATATAN UNTUK PENULIS

CD-VALUE Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan diterbitkan sebagai media informasi dan komunikasi serta forum pembaharuan dan penyajian masalah disiplin ilmu ekonomi dalam bidang manajemen, akuntansi, studi pemasaran, koperasi dan kewirausahaan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Redaksi mengundang para ahli, dosen, sarjana dan praktisi untuk menulis secara bebas dan kreatif. Penyajian dapat berupa artikel, hasil penelitian atau gagasan orisinal yang segar, obyektif dan penuh tanggungjawab. Redaksi dapat menerima 7 naskah berupa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi dan maksud tulisan. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan dilengkapi abstrak bahasa Indonesia/Inggris, masing-masing tidak lebih dari 700 kata. Dimasukkan dengan urutan: judul tulisan, nama penulis, abstrak, keywords/kata kunci, isi tulisan, daftar pustaka dan dilengkapi riwayat penulis dengan urutan: nama lengkap dengan gelar resmi yang dipakai, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/jabatan terakhir. Jika tulisan berupa hasil penelitian, isi dimuat dengan urutan: permasalahan, latar belakang yang mencakup pokok permasalahan dan tujuan penelitian, tujuan pustaka, pendahuluan atau bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Panjang naskah kurang dari 6000 kata. Bila penulis lebih dari seorang cantumkan namanya secara berurutan sesuai dengan kode stil penulisan. Tabel, gambar dan grafik harus diberi judul singkat, jelas, diberi nomor urut, jelas, dan asli. Untuk naskah yang pernah dimuat dalam penerbitan lain atau pernah disampaikan dalam orasi, seminar/diskusi harus disebutkan dalam catatan pada halaman pertama. Naskah dapat dikirim melalui email: cd-value@ikopin.ac.id atau dikirim ke redaksi CD-VALUE Gedung Prodi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKM/PI), Kawasan Pendidikan Tinggi Jemberor KM 21,5 Bandung Jawa Barat - Indonesia Telp. 022-7799079, 022-7799033, 022-7794444 Fax. 022-7799032 Website: www.ikopin.ac.id

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman,

Jurnal CO-VALUE volume I nomor 1 ini merupakan jurnal terbitan perdana yang menurunkan beberapa tulisan antara lain: "Inventarisasi Masalah-masalah Pengembangan Koperasi dan UKM", karya Prof. Dr. HRM. Ramudi Arifin, SE., MSi. Tulisan Ir. Nurhayat Indra, MSc, tentang "Peranan Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Skala Usaha dan Efisiensi Usaha Anggota", karya Sukrisahadi, SE., Ak., MSi dan Eka Setijahnika, SE., MSi tentang "Implementasi Perhitungan Promosi Ekonomi Anggota Sebagai Dasar Evaluasi Kinerja Koperasi", dan karya Dr. H. Erry Supriyadi, MTi dan Agus Arifin, SE., Ak., MSi tentang "Kajian Explorasi Koperasi Energi dan Agrowisata: Pemikiran Peluang dan Tantangan"

Masalah mendasar yang melilit gerakan koperasi di Indonesia adalah penampilan kinerja yang tidak sesuai dengan nilai, norma dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Penyebab utamanya adalah belum dipahaminya konsep berkoperasi secara utuh baik oleh para pejakunya maupun oleh peminanya, demikian pendapat HRM. Ramudi Arifin.

Sementara itu, Erry Supriyadi dan Agus Arifin, bahwa secara normatif dan makro ekonomis, koperasi mampu mengelola kepariwisataan dan energi, untuk itu perlu mempersiapkan komponen sumberdaya koperasi bagi pengusahaan maupun pengelolaan kepariwisataan dan energi yang mencakup sumber daya manusia, finansial, dan teknologi.

Pembaca yang budiman,

Untuk mengetahui tulisan-tulisan lainnya, kami mempersilahkan pembaca untuk membaca tulisan lain yang tidak kalah menariknya untuk disimak isi keseluruhan jurnal CO-VALUE volume I nomor 1 pada bulan ini.

Redaksi

INVENTA

Abstrak
Masalah ini tidak secara dipahami Program-pri dasar kopersi jawab sendiri

Keyword : N/A

1. Pendahuluan
Secara ini terjadinya ke kenyataan. Ke diharapkan Berdasar kan y terdapat terba upaya-upaya i Odaa telah besarnya pe Namun bagaim untuk meneng basis kekuatan an masalah p masalah-masala strategi di di putusan-keputa Di dalam m didasarkan pada 1). Penguatan takutan c

CO-VALUE Volume I

KAJIAN EKSPLORASI KOPERASI ENERGI DAN KOPERASI WISATA: PEMIKIRAN, PELUANG, DAN TANTANGAN

Oleh: Ery Supriyadi R. dan Agus Arifin

Abstrak

Pemberdayaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan keberagaman dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi, dan merumuskan wisnis baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sektor energi dan pariwisata adalah sektor strategis yang dapat diraih oleh koperasi untuk meningkatkan pemer dan fungsinya berkontribusi bagi anggota dan masyarakat. Secara normatif dan mikro ekonomis, koperasi mampu mengelola kepariwisataan dan energi, tetapi perlu mempersiapkan komponen sumberdaya koperasi bagi penguasaan maupun pengelolaan kepariwisataan dan energi yang mencakup sumber daya manusia, finansial, dan teknologi.

Koperasi memainkan peran sebagai produsen energi, pemasok kebutuhan energi, pengelola layanan energi yang terintegrasi secara sistemik. Koperasi dapat berperan sebagai katalisator, mediator, fasilitator, atau integrator kegiatan kepariwisataan bersama anggota. Peran koperasi akan dirasakan pada sektor energi jika memberikan manfaat ekonomi berupa tarif maupun harga dan layanan energi yang terjangkau dan diucapkan bersama oleh anggota dalam wadah rapat anggota, serta manfaat ekonomi tidak langsung dalam bentuk pengembalian nilai partisipasi anggota dalam pemanfaatan energi kepada anggota. Kegiatan koperasi dalam kepariwisataan membuka peluang pengembangan unit usaha koperasi dan manfaat bagi anggota. Koperasi wisata akan memberikan nilai tambah bagi anggota. Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan koperasi perlu proaktif mengambil peran dalam sektor penguasaan dan pengelolaan energi maupun pariwisata.

Keyword : Pariwisata, Energi, Koperasi, Pengelolaan, Penguasaan, Manfaat.

1. PENDAHULUAN

Salah satu dokumen lokalitas prima pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang (RPJMRPJP), yang diantaranya memuat penjelasan program pembangunan yang menempai koperasi pada posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan potensi tawar

dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar. Disamping itu, koperasi dan UMM berperan pula dalam memperkuat penyediaan lapangan kerja, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mengupayakan pemerataan pendapatan masyarakat. Pada saat yang bersamaan dengan itu, upaya meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional merupakan tantangan pembangunan dalam era globalisasi saat ini. Dengan perspektif peran seperti itu, maka tujuan pem-

berdaya koperasi di antaranya adalah meningkatkan produktivitas UKM/UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi, meningkatkan kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi, dan berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan mengembangkan Koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Selain itu, dilakukan pula upaya meningkatkan peran koperasi sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memperluas basis kompetensi berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berprestasi untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks sasaran dan arah pengembangan koperasi tersebut di atas, maka koperasi dapat mengambil peran dalam berbagai sektor pembangunan secara aktif memberikan nilai manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Salah satu program sektor pengembangan energi adalah program listrik masuk desa yang dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan, serta meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat pedesaan. Pengadaan listrik dengan menggunakan sumber energi setempat seperti tenaga air mikro, energi angin, energi surya, dan energi biomassa perlu terus dikembangkan dalam rangka pembangunan sumber energi yang efisien, hemat biaya dan tidak berdampak kerusakan lingkungan alam. Koperasi diharapkan dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam menyediakan dan mengelola energi.

Selanjutnya sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia, Indonesia dikaruniai alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, terdiri dari berbagai macam suku dengan corak ragam budayanya yang unik, memiliki potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi destinasi-destinasi baru pariwisata bertarif internasional. Sektor ini, jika dikelola secara profesional akan memberikan nilai tambah (added value) baik secara ekonomi, sosial

(jasa) dan lingkungan (sumberdaya) maupun nilai strategis lainnya.

Pariwisata dan energi merupakan sektor pembangunan yang cukup signifikan dan strategis sebagai roda penggerak ekonomi. Jika koperasi berperan dalam mendorong pembangunan ini, muncul pertanyaan mengenai adakah peluang bagi koperasi untuk mengusahakan dan mengelola koparwisata dan energi, apakah koperasi memiliki kemampuan untuk mengusahakan dan mengelola koparwisata dan energi, sejauhmana koperasi mampu mengelola koparwisata dan energi, serta apakah tersedia sumberdaya koperasi untuk mengelola koparwisata dan energi (SDM, finansial, teknologi). Tulisan ini mencoba mengkaji peluang dan tantangan peran koperasi dalam kedua sektor pembangunan tersebut sebagai suatu pemikiran awal.

1. Pembangunan Koperasi dan Energi

Untuk mencapai sasaran pembangunan koperasi, maka program pemberdayaan koperasi dan UKM di arahkan pada program pokok, yaitu program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, pemberdayaan usaha skala mikro, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat, koperasi menjadi dibutuhkan dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat, lebih dalam krisis energi yang dialami Indonesia saat ini. Falsafah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dalam pembangunan perekonomian Indonesia diarahkan pada upaya pemberdayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian yang pada hakikatnya menempatkan koperasi sebagai institusi atau lembaga perekonomian tidak sebatas pada kepentingan-kepentingan ekonomi saja melainkan juga bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama anggota koperasi. Jika seluruh masyarakat pengguna energi menjadi anggota koperasi, berarti koperasi berkewajiban memberi layanan yang terbaik bagi anggotanya, dan sekaligus perkembangan dan kemajuan koperasi diartikan dan dinikmati masyarakat sebagai potensi usaha koperasi.

Koperasi dalam melayani dan mengembangkan usaha memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tanggungjawab koperasi sebagai lembaga

perkonomi pemberdayaan produksi oleh Koperasi. Anggota-anggotanya atas asas seorang. Peran koperasi, manfaatnya langsung ini.

Pengembangan energi akan melakukan sektor dan partisipasi ekonomi serta tumbuh di "revolusi" produksi tantangan berusaha bidang ini akan. Koperasi pemberdayaan dan usaha dimilikinya pengusaha.

Terdapat pemberdayaan melalui cara sistem pemeringkatan penunjang usaha bagi pemasaran kebutuhan masyarakat mengingat kebutuhan usaha yang itu, kemampuan sector akan dan diperbantukan.

Sinergi perekonomian terjadi, tujuan perkembangan energi. Sinergi pada daya. Pada saat

2

perekonomian rakyat. Koperasi berorientasi pada pemberdayaan anggota dalam kepemilikan aset produksi ekonomi dan pelayanan secara simultan. Koperasi Indonesia mengutamakan ketahanan anggotanya dan masyarakat sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, bukan keuntungan orang seorang. Pengakuan dan pertumbuhan koperasi akan meningkat, manakala kinerja koperasi dirasakan manfaatnya oleh anggota baik dalam bentuk layanan langsung maupun tidak langsung.

Pembangunan peran koperasi pada sektor energi utamanya dibangun dan kondusif untuk melakukan usaha bersama dalam koperasi pada sektor energi, yaitu sebagai dinamisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri. Idealnya, koperasi dapat tumbuh berkembang dan mengambil peran "revolusioner" menghidupkan kekuatan ekonomi yang dirongki oleh rakyat banyak guna membawa perubahan ekonomi global. Koperasi secara kolektif berusaha meningkatkan proses-proses produksi bidang energi untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Koperasi dapat mengambil peran dalam pemberdayaan di sektor energi agar unit ekonomi dan usaha kecil sebagai anggota koperasi yang dimilikinya mendapatkan manfaat langsung dari perusahaan atau pengkayaan energi.

Terdapat cukup banyak peluang dalam upaya pemberdayaan koperasi inisiatif pemerintah melalui kemudahan dan fasilitas pendanaan usaha, sistem pembinaan manajemen usaha, pelatihan dan peningkatan skill, ketersediaan bahan baku dan penunjang lain guna kelangsungan produktivitas usaha bagi koperasi. Jaringan distribusi dan pemasaran pada iklim persaingan juga menjadi kebutuhan koperasi yang perlu mendapat perhatian, mengingat pada sisi lain kebutuhan energi menjadi kebutuhan orang banyak, di sisi lain persaingan usaha yang adil dan seimbang haruslah terjadi. Untuk itu, kemampuan koperasi berusaha dan pengelolaan sektor akan jauh lebih diutamakan untuk dipikirkan dan dioperasikan dari pada sekedar menunggu bantuan/dukung dari pemerintah.

Sinergi antara pertumbuhan koperasi dengan perekonomian nasional dalam sektor energi diharapkan terjadi, sehingga keadaan ini akan memiliki daya tahan perekonomian rakyat menghadapi situasi krisis energi. Sinergitas ini diharapkan akan berdampak pada daya tahan ekonomi rakyat melalui koperasi. Pada saat kejadian krisis ekonomi tahun 1997,

koperasi dan UMKM menunjukkan ketahanan sebagai sektor yang kental dan kuat menghadapi krisis, bahkan menjadi kutub pengaman perekonomian. Sementara pada saat krisis tersebut, usaha-usaha swasta dan BUMN tidak menunjukkan signifikansi dalam pertumbuhan perekonomian bangsa, bahkan menyebabkan permasalahan seperti masalah kepelititan, defisit dan pelarian atau penyalahgunaan modal usaha, kesejahteraan berubuh, termasuk beberapa kegiatan usaha pencemaran dan penusutan lingkungan hidup.

Secara ingkatis, sayangnya koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia sebagai sokoguru perekonomian Indonesia dalam pasal 33 UUD 1945 tidak diamanatkan, padahal ekonomi koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung nilai-nilai strategis budaya bangsa yang berisi asas kekeluargaan dan kemandirian, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Koperasi merupakan wujud kehidupan berbangsa dan bernegara bermuara pada terwujudnya keadilan sosial. Bahkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan semangat arah dan gerak keadilan sosial, menempatkan koperasi tidaklah semata-mata menjadi lembaga perekonomian tetapi juga wahana berkumpul, tukar pendapat serta membicarakan persoalan kehidupan masyarakat termasuk problematika energi.

Koperasi yang ada di desa maupun kota dapat menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya masing-masing. Maka mudurnya koperasi akan bermula dari semangat membangun wilayahnya secara bersama-sama. Tidaklah dapat dipungkiri, bahwa kenyataannya koperasi menghadapi berbagai kendala dan tantangan dan menajarkan fungsinya, sehingga harapan tersebut masih masih sangat tertunda dan jauh dari harapan.

Seperti menunjukkan pula bahwa koperasi beroperasi dan berfungsi dalam menghadirkan swasembada pangan dan mengentaskan kemiskinan pada masa lalu dan saat krisis ekonomi. Namun demikian prestasi kemajuan koperasi ini diperepsikan sebagai usaha dalam skala kecil-kecil dan tersebar-luas, sehingga koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat distroptikan sebagai lembaga perekonomian yang tidak memberi keuntungan signifikan, bahkan sebatas dijadikan alat legitimasi institusional perilaku penguasa. Lebih diperparah lagi terdapat upaya mendiskreditkan keberadaan koperasi sebagai akal bial kelirpukan sistem perekonomian nasional ketika memilih

pemberdayaan perekonomian rakyat melalui koperasi. Pembangunan koperasi dalam hal ini dihadapkan pada dua sisi mata pedang yang tajam, yaitu sisi intervensi yang memberdayakan dan memperluas koperasi, sisi lainnya membatasi gerak langkah dan menegasikan koperasi.

Secara realitas, ketahanan perekonomian nasional dalam krisis ekonomi dropang oleh koperasi, ekonomi kecil dan menengah yang ada di masyarakat. Dimana koperasi (pedagog, pasar, kemandirian, desa, fungsional) dan partisipasi aktif para anggotanya menjadi tonggak utama ketahanan ekonomi mengatasi krisis ekonomi. Koperasi telah nyata memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan dan pemberdayaan perekonomian daerah maupun nasional, di antaranya adalah KUD Penerus Baru di kabupaten Tapi yang bergerak di Usaha besar Batu Bara, Kojalisba (Koperasi Jasa Kelistrikan Bali) yang anggotanya adalah para direktur perusahaan kontraktor listrik (Bisnis Indonesia, Edisi Khusus Juli 2008). Saat ini kasamua koperasi sektor energy di atas telah menjadi unit-unit usaha bernilai milyaran rupiah.

Pemerintah mulai mengaktifkan keberadaan dan pemberdayaan koperasi dan UMKK, yang terlihat pada keseriusan pemerintah melakukan upaya-upaya pengulahtannya melalui pembebasan insentif, tambahan APBN, pemilikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sarana akses pembiayaan dan upaya percepatan tumbuhnya sektor riil. Hal ini dibuktikan untuk membuka perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, sekaligus membesarkan koperasi.

III. Peluang dan Tantangan Koperasi Energi

Sektor energy merupakan sektor strategis dalam mendukung gerak perindustrian dan perkonominan di perdesaan maupun di perkotaan. Energi yang tersedia untuk menunjang kegiatan ekonomi harus selaras dengan kebutuhannya, jika tidak akan memunculkan tensesjangan bahkan krisis energy yang dapat mengganggu gerak pembangunan dan roda gerakan ekonomi. Energi terbarukan maupun tidak terbarukan memerlukan strategi pengelolaan dan pengusahaan sumber energy. Salah satu sumber energy yang cukup strategis adalah jenis berasal dari mikro hidro, solar sistem, dan bio-energy.

Secara supra sistem, koperasi dapat berperan dalam mengusahakan dan mengelola energy baik bahan bakar minyak, gas, listrik. Persoalan mendasar

dan perusahaan energi oleh koperasi adalah keterbukaan kesempatan dan kemampuan koperasi itu sendiri. Jika kesempatan pengusahaan energy terbuka bagi koperasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kebijakan pengusahaan dan pengelolaan oleh koperasi.
2. Kelembagaan koperasi (organisasi, keanggotaan, finansial) pada tingkat nasional dan daerah.
3. Kelembagaan Pengelolaan dan Pengusahaan Energy oleh koperasi pada tingkat perdesaan dan perkotaan (Skala produksi, Skala pelayanan, Skala pengembangan (anggota, non anggota, masyarakat, barang publik).
4. Kebijakan, Tantangan Koperasi pada operasionalisasi pengusahaan dan pengelolaan energi.
5. Peluang dan tantangan profesionalisme koperasi dalam pengelolaan dan pengusahaan energi.
 - o Koperasi tidak siap dan tidak mampu meraih kesempatan.
 - o Koperasi tidak siap tapi mampu.
 - o Koperasi siap dan mampu.
 - o Koperasi siap tetapi tidak mampu.

Sajian berikut ini merupakan contoh operasional pada tingkat mikro di satu desa dalam pengelolaan energi listrik. Mikro hidro adalah salah satu sumber energi yang menghasilkan daya energi listrik yang cukup besar. Operasional PLTM pada suatu desa mampu menyediakan tenaga listrik yang dibutuhkan serta mampu menyerap tenaga kerja. Pada PLTM memerlukan tenaga kerja untuk merencanakan konstruksi jalan, kolam air waduk, pipa pesat, rumah jaga, konstruksi turbin dan generator yang sesuai dengan debit air dan tinggi jatuh air, transmisi, distribusi, instalasi rumah, serta gardu-gardu, menghitung biaya penyambungan pertama, dan harga jual per KWH, serta mendapatkan konsumen baru, dan keamanan. Dengan demikian, jika koperasi akan mengelola dan mengusahakan energi yang bersumber dari mikro hidro, perlu menetapkan dan menyediakan tenaga profesional yang handal dan memadai. Hal ini diperlukan untuk menyajikan sediaan energy yang cukup dan memberikan layanan optimal yang memuaskan bagi para pelanggan (anggota dan masyarakat). Pengelolaan PLTM pada saat beroperasi setidaknya memerlukan tenaga 7 orang dari putra-putri dari anggota KUD yang harus diberi pendidikan terlebih dahulu, 2 orang dalam bidang listrik, turbin, 2 orang dalam bidang

penyakit dan perorangan 1 orang

Jika meluar listrik solar sel 1 orang dalam 10 per jiwa, pengenal system, hal tentu memerlukan koperasi dahulu, penyakit kran dan orang ke koordinasi

Unit operasi diberi pe listrik dan untuk pe rekening penanggun ini bene secara li pengelol menjadi pada 10 promosi

Jika menajar hubungan lebih eff dilakukan anggota dikuti di sesuai oleh si profesio koperasi dalam 1 ekonomis pemenuh mendu kreatif 100pekerja

CS-VALUE

penyambungan konsumen baru, pencatatan meteran, dan pembagian rekening listrik, 1 orang pesuruh, dan 1 orang sebagai penanggung jawab dan koordinator.

Jika menggunakan jenis PLTS, koperasi memerlukan tenaga kerja dalam pembangunan ke-listrikan desa adalah 2 orang untuk pemasangan solar sel dan instalasi rumah beserta alat pengaman, 1 orang untuk menganalisa data sosial, ekonomi dalam rangka penghitungan pendapatan penduduk per jiwa. Tentunya, tenaga kerja ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai solar system, jika perlu diberikan pendidikan khusus untuk hal tersebut. Pada saat operasi, pengelolaan PLTS memerlukan 6 orang dari putra-puteri dari anggota koperasi yang harus diberi pendidikan terlebih dahulu, 2 orang dalam bidang perawatan PLTS dan penyambungan konsumen baru, 1 orang pembagian uran dan penyisiran ke bank, 1 orang sapro, 1 orang pesuruh, dan 1 orang penanggung jawab atau koordinator.

Untuk pengelolaan tenaga listrik PLN pada saat operasi memerlukan tenaga 6 orang yang harus diberi pendidikan, 2 orang dalam bidang perawatan listrik dan penyambungan konsumen baru, 1 orang untuk pencatatan meteran, 1 orang untuk pembagian rekening listrik, 1 orang pesuruh, dan 1 orang penanggung jawab atau koordinator. Semua tenaga ini berasal dari keluarga anggota koperasi, yang secara langsung memberi pembelajaran dan manfaat pengelolaan energi kepada anggota koperasi, juga menjadi regenerasi sumberdaya manusia koperasi pada masa yang akan datang, membership promotion.

Jika koperasi diberi kesempatan dan mampu menjalankan pengelolaan sumber energi, maka hubungan kegiatan ekonomi dari energi seharusnya lebih efektif dan efisien. Proses produksi energi yang dilakukan oleh koperasi atas prakarsa bersama para anggota di suatu desa secara musyawarah mufakat, dikuti dengan pengelolaan konsumsi yang terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat/anggota, didukung oleh sistem distribusi dan pengelola yang profesional dari segenap sumber daya yang dimiliki koperasi. Kondisi ini merupakan pelayanan publik dalam sektor energi dalam rangkaian kegiatan otonomi optimum. Kecukupan pasokan energi guna pemenuhan kegiatan anggota dan masyarakat akan mendukung gerak usaha ekonomi produktif dan kreatif anggota. Kepuasan layanan menjadi kesepakatan dan ciri khas koperasi, dimana anggota

sebagai pelanggan mendapatkan layanan optimal di samping sebagai pemilik organisasi koperasi itu sendiri. Dengan demikian, koperasi berperan sebagai produsen energi, pemasok kebutuhan energi, pengeloa layanan energi yang terintegrasi secara sistemik. Peran koperasi akan semakin dirasakan dengan diperoleh manfaat ekonomi langsung berupa tarif maupun harga energi yang terjangkau dan disepakati bersama oleh anggota dalam wadah rapat anggota, serta manfaat ekonomi tidak langsung dalam bentuk pengembalian nilai partisipasi anggota dalam pemanfaatan energi kepada anggota melalui mekanisme nilai hasil usaha atau promosi ekonomi anggota.

IV. Pembangunan Koperasi dan Kepariwisata

Terdapat sejumlah alasan mengapa sebuah negara khususnya negara berkembang merancang sektor pariwisata salah satu sektor unggulan. Alasan umum pengembangan pariwisata adalah bahwa segala sumberdaya hama setempat dapat dimonevikan dan dialokasikan untuk menghasilkan nilai manfaat. Kegiatan pariwisata mampu memberikan kontribusi sangat signifikan dan penting bagi perekonomian negara. Adapun alasan khusus dari keberadaan pariwisata dalam perekonomian adalah (1) sebagai sumber devisa luar mata uang asing, (2) sebagai industri ekspor, pariwisata tidak menghadapi aturan pembatasan dan kuota seperti barang-barang pabrikan, bahan mentah dan produk-produk kebutuhan dasar, (3) wisatawan hanya menggunakan infrastruktur alam, misalnya kondisi iklim, sejarah, kebudayaan dan sebagainya yang tidak didesain khusus, (4) pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja, serta (5) sebagai sebuah aktivitas campuran yang dapat menjadi pendorong bagi produk sektor lain, seperti makanan, cendera mata, akomodasi dan infrastruktur lainnya. Dengan demikian, kepariwisataan memberi nilai tambah dan multiplier effect yang besar dalam menggerakkan roda ekonomi baik secara wilayah maupun sektor kegiatan ekonomi.

Pada pasal 17 UU No. 10, Tahun 2008 tentang Kepariwisata secara eksplisit mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan dukungan kebijakan kepada Koperasi dan UKM untuk berperan sebagai pelaku industri pariwisata secara luas. Pada saat yang sama pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM juga telah memberikan fasilitas perkuatan

model kepada beberapa koperasi yang mengelola obyek-obyek wisata, disamping juga ada beberapa koperasi secara alamiah yang telah masuk dalam industri pariwisata.

Indonesia sebagai negara kepulauan tropis terbesar di dunia, dengan karunia alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, terdiri dari berbagai macam suku dengan corak ragam budayanya yang unik, memiliki potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi destinasi-destinasi baru agrowisata bertaraf internasional. Sektor ini, jika dikelola secara profesional akan memberikan nilai tambah (*added value*) baik secara ekonomi, sosial (jasa) dan lingkungan (sumberdaya) maupun nilai strategis lainnya. Terlebih lagi didukung adanya fakta bahwa, trend wisatawan internasional kini terpesor ke kawasan Asia-Pasifik yang merupakan destinasi-destinasi baru yang masuk kedalam kategori alternatif tourism yang didalamnya termasuk *village tourism*, *adventure tourism*, *agrotourism*, dan *ecotourism* (Minda Nuryanti, 2005).

Masalah utamanya adalah bagaimana rumusan dan implementasi strategi bagi pengembangan koperasi berbasis pariwisata. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar bagaimana koperasi mengembangkan usaha pariwisata yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat lokal dengan memperlebar lingkungan dan peluang pasar. Tentunya hal ini berkaitan dengan infrastruktur, infrastruktur, pengelolaan, dan kelembagaan dan bidang perkooperasian dan kepariwisataan.

Pengembangan berbasis destinasi pariwisata menggunakan konsep *borderless*, artinya pengembangan pariwisata tidak menaruh-nisahkan pengembangan berdasarkan batas-batas wilayah administratif, sehingga pengembangan pariwisata pada suatu wilayah tidak berdasarkan pada pendekatan wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pergerakan wisatawan, baik dalam paket perjalanan maupun perjalanan bebas bersifat lintas dan tidak mengenal batas ruang administratif. Pengembangan pariwisata mengarah pada keterpaduan lintas wilayah demi membangun daya tarik kolektif yang kuat. Oleh karena itu, integrasi rencana tata ruang wilayah antar propinsi, dan antara kabupaten/kota akan menentukan pula determinasi keberhasilan kegiatan pengembangan agrowisata sebagai sektor penggerak ekonomi wilayah dan masyarakat, sehingga struktur jaringan, kelembagaan, sistem layanan dan

kepariwisataan pada suatu wilayah sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi fungsi kepariwisataan dan mengakselerasikan perkembangan atraksi, aktivitas, akses, dan manfaat supaya produk wisata yang bernilai tambah.

Pengembangan pariwisata berbasis destinasi menggunakan konsep *cluster* (klaster), yaitu pengembangan pariwisata yang menekankan adanya sebuah entitas daerah tujuan wisata yang merupakan konsentrasi geografis dari mata rantai usaha produksi sector tertentu dan institusi pendukungnya yang membentuk jaringan kerja yang sinergis dan komplementer. Dengan demikian, orientasi pengembangan pariwisata berbasis destinasi mengarah pada jejaring jejaring kerja yang terkonsentrasi pada mata rantai usaha dan institusi dan keterkaitan yang kuat antar.

Pengembangan pariwisata berbasis destinasi juga menggunakan *market driven*, artinya bahwa pengembangan pariwisata didasarkan pada keinginan pasar, pasar sebagai penggerak, dan akses pasar terhadap produk wisata yang dominan untuk dapat dinikmati. Persepsi wisatawan mengenai destinasi pariwisata menjadi faktor kunci dan penting yang dipertimbangkan dalam penetapan suatu obyek atau kawasan sebagai destinasi pariwisata. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dari dan menuju lokasi pariwisata menjadi kunci keberhasilan penunjang dan pelancar keberadaan dan perkembangan kegiatan pariwisata pada suatu wilayah. Rencana tata ruang, rencana pembangunan, dan rencana sektor pariwisata yang terintegrasi dan bersinergis akan memperkuat dan mempercepat proses dan hasil kegiatan agrowisata.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengembangan pariwisata sangat berhubungan erat dengan kebijakan tata ruang, kebijakan pembangunan, dan sektoral pada semua tingkat wilayah maupun pemerintahan. Kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah daerah, antara pemerintah pusat dan daerah, dan segenap pemangku kepentingan memiliki tugas dan kewajiban bersama mengembangkan agrowisata sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal dan upaya mengentaskan kemiskinan berbasis pariwisata. Pengembangan pariwisata di Indonesia terkait erat dengan pembinaan kebudayaan yang terarah pada pembangunan karakter dan sikap bangsa yang penuh dengan kemandirian. Pada sisi lainnya, pengembangan pariwisata memerlukan investasi jaringan jalan,

investasi air dan nyamai perberdaya denikian pe kan kebijaku teknis yang ngembangan meningkatku

Aksesit wisatawan: Aksesibilitas fasilitas transportasi, waktu tempuh daerah tujuan sebagainya, amenities, y kegiatan pariwisata, fasilitas akomodasi pariwisata, bankan sa tersedia n kebijakan ti yang berico pemerintahi keberhasilan dalam jangi Pengembangan dukungan y dalam ring penciptaan kopriwisata

Secara sebagai ko uniknya k negeri lintas keula neg bergantung (terbentuku tergantung dapat dipen yang indah yang sepa rumah-rum beresjaht.

Ciri-ciri monofasika

investasi energi, penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman, pendayagunaan sumberdaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal/koperasi. Dengan demikian pengembangan agrowisata perlu memerlukan kebijakan-kebijakan ruang, sektor, dan kegiatan teknis yang mendukung kelancaran kegiatan pengembangan agrowisata yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Aksesibilitas adalah sarana yang mempermudah wisatawan untuk mencapai daerah tujuan wisata. Aksesibilitas mencakup dukungan sistem transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, dan moda transportasi, termasuk di dalamnya menyangkut waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai daerah tujuan wisata serta benda pembantu arah dan sebagainya. Destinasi pariwisata juga menyangkut amenitas, yaitu fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan pariwisata yang ditujukan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Amenitas mencakup fasilitas akomodasi, rumah makan, retail, toko cenderamata, biro perjalanan wisata, pusat informasi pariwisata, pusat kesehatan, pusat layanan perbankan, sarana komunikasi, pos keamanan, ketersediaan air bersih dan listrik. Dengan demikian, kebijakan tata ruang, tata lingkungan, dan sektoral yang terkoordinasi dan terintegrasi antar wilayah dan pemerintahan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pengembangan kegiatan agrowisata dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Pengembangan agrowisata memerlukan adanya dukungan yang sistemik dan integral antar kebijakan dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata dan penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.

Secara ekonomi, pariwisata sesungguhnya sebagai komoditi ekspor, yaitu ekspor jasa. Unikannya komoditi pariwisata tidak bergerak ke luar negeri tetapi jasa dan nilainya saja yang bergerak keluar negeri (Spillane, 1994). Pariwisata sangat bergantung pada sumber daya ekonomi partikular (tertentu/khusus) di negara pengeksport. Pariwisata tergantung pada sumber daya ekonomi yang tidak dapat dipindah seperti panorama alam pegunungan yang indah, hamparan pantai yang berudara tropis yang segar, atau kebudayaan yang khas dengan rumah-rumah adat dan/atau bangunan-bangunan bersejarah.

Ciri-ciri khas ekonomi dari industri pariwisata menunjukkan jenis dampaknya terhadap masyarakat

tempat wisata. Lebih lanjut Spillane (1994) menjelaskan paling sedikit ada lima ciri-ciri khas yang khusus dimiliki oleh industri pariwisata, yaitu: (1) produk pariwisata tidak dapat disimpan, (2) permintaan produk pariwisata tergantung pada musim (*highly seasonal*), (3) permintaannya dipengaruhi oleh faktor luar dengan pengaruh yang tidak dapat atau sulit diramalkan (*unpredictable influences*) (3) permintaannya dipengaruhi oleh perubahan dalam nilai kurs valuta, kebijaksanaan politik, dan perubahan cuaca, pandemi suatu penyakit, (4) permintaan bergantung pada sejumlah motivasi yang rumit. Ada lebih dari satu alasan mengapa wisatawan berkunjung ke destinasi wisata tertentu, (4) permintaan pariwisata sangat elastis terhadap harga dan pendapatan.

Kegiatan pariwisata ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Kelangkaan dan keahlian industri pariwisata menjadi daya tarik wisatawan untuk mengkonsumsi produk wisata. Namun demikian, permintaan pariwisata bersifat elastis, artinya permintaan terhadap produk wisata sangat dipengaruhi oleh perubahan yang relatif kecil dalam harga dan pendapatan. Artinya, jika harga dan pendapatan naik atau turun sedikit saja, perubahan tersebut akan sangat mempengaruhi konsumsi jasa-jasa pariwisata. Disamping itu, perilaku wisatawan juga berbeda-beda. Setiap sekali unsur loyalitas untuk sebagian besar para wisatawan manca negara, mereka cenderung mengunjungi tempat yang berbeda tiap tahun dari pada kembali ke tempat yang sama setiap lima tahun. Maka setiap lokasi wisata harus berfokus pada sebagian (*segment*) dari seluruh pasar pariwisata.

Dalam industri pariwisata, pelaku usaha pariwisata menghadapi suatu produk yang hidup (*live product*) dan suatu tempat tujuan wisata (*destination*). Saat ini terdapat adanya perubahan preferensi dan motivasi wisatawan dunia yang berkembang sangat dinamis, sehingga wisatawan cenderung mencari pemenuhan kebutuhan fisik dan psikisnya dalam menikmati obyek yang spesifik (udara segar, pemandangan, pengolahan produk tradisional, agrotourism, budaya & khas lokal, museum cultural). Menjadi catatan penting bahwa walaupun keberadaan usaha pariwisata dibijakan untuk memajukan wisatawan manca negara, tetapi lingkungan baik sosial, dan kebudayaan harus dilindungi.

Pengembangan pariwisata harus menjadi bagian integral pembangunan koperasi di Indonesia dalam tataran kebijakan, pilar-pilar kelembagaan, dukungan struktur pemodal yang kuat, sistem manajemen yang efektif, sistem pengawasan yang kuat, regulasi yang kondusif, perlindungan dan jaminan usaha, pengembangan standar kompetensi profesi kepariwisataan, promosi, jaringan dan sistem informasi, dan dukungan infrastruktur. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan sinergitas dan integrasi pembangunan koperasi dan pengembangan pariwisata yang memberi nilai guna dan optimalisasi bagi para pelaku usaha kegiatan kepariwisataan yang berkelanjutan.

V. Peluang dan Tantangan Koperasi Wisata

Konsep pembangunan yang berkelanjutan berkembang berdasar pada kenyataan terjadinya berbagai perubahan lingkungan karena aktifitas ekonomi manusia yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan berkelanjutan juga menyangkut antisipasi terhadap perubahan iklim, kesempatan, dan viability. Mc. Kucher (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan industri pariwisata secara berkesinambungan, yaitu masalah pemeliharaan ekologi, hubungan dengan masyarakat lokal dan kepuasan wisatawan. World Tourism Organization (WTO) memberikan prinsip-prinsip pengembangan ekologi, hubungan dengan masyarakat lokal dan kepuasan wisatawan. World Tourism Organization (WTO) memberikan prinsip-prinsip pengembangan industri pariwisata berkelanjutan dengan mengadakan keseimbangan pembangunan antara aspek lingkungan (*environmental*), ekonomi (*economic*) termasuk ekonomi masyarakat lokal, dan sosial budaya (*socio cultural*). Dalam industri pariwisata, pengembangan pariwisata, pengembangan lingkungan dan pengembangan sosio ekonomi merupakan suatu siklus dan hubungan kumulatif (Carter dan Goodall, 1997: 65). Pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan menempatkan aspek sumber-sumber lingkungan sebagai dasar kompromi yang menentukan prospek penduduk lokal dimasa yang akan datang.

Selanjutnya Fennel (1997) menyatakan bahwa ekowisata merupakan bentuk pariwisata alternatif atau pariwisata berkelanjutan. Ekowisata memiliki

beberapa karakteristik yang mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu perjalanan yang bertanggung jawab, mata resource-based (pendekatan berbasis sumberdaya alam), kawasan yang relatif tidak terganggu, memperhatikan konservasi dan preservasi lingkungan, dampak rendah, tidak konsumtif, dan berorientasi lokal, mempelajari, mengamati dan menikmati pemandangan, tumbuhan, fauna dan manifestasi budaya, dan melakukan pemberdayaan masyarakat & keuntungan ekonomi lokal. Konsep ini sejalan dengan upaya menanggulangi masalah kemiskinan melalui sektor pariwisata yang kemudian dikenal dengan *community-based tourism (CBT)*. Dalam istilah Indonesia, CBT adalah pariwisata berbasis kerakyatan merupakan gagasan yang relative baru, dimana munculnya gagasan ini antara lain karena pariwisata modern telah banyak mengabaikan posisi daripada masyarakat lokal.

Paradigma kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan pada (1) pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development*); (2) persatuan dan Kesatuan Bangsa; (3) Pengentasan Kemiskinan (*Poverty Alieviation*); (4) Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dengan demikian, kekuatan pembangunan pariwisata berada pada masyarakat sebagai kekuatan dasar. Pariwisata berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, serta pariwisata adalah kegiatan seluruh lapisan masyarakat (Pemerintah hanya sebagai fasilitator). Berdasarkan hal ini, maka pembangunan pariwisata berbasis masyarakat diarahkan untuk mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan, mendorong tumbuhnya kemitraan, dan mendorong tumbuhnya daya saing lokal melalui pengembangan keumatan lokal.

Secara normatif, dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 17 dinyatakan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara (1) Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan (2) Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Landasan normatif diatas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk berperan dalam industri pariwisata termasuk didalamnya industri agrowisata yang berbasis masyarakat lokal.

Geografis sektor (Merupakan asal bahan baku produk dan % dampak dominan) oleh pemilik investor menjadi pemodal usaha atau badan usaha atau badan kepariwisataan sekaligus bertanggung jawab adalah bagian dari keterkaitan. Pertanyaan optimalisasi yang merupakan terkait pula koperasi di wilayah ini.

Salah satu pariwisata kemandirian pariwisata pemikiran koperasi. Dukungan ada ini berupa ke wisata, dan pendamping promosi, pariwisata selenggara industri pariwisata.

Sebagai untuk be pariwisata

Secara makro, pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang menyumbang devisa di urutan ketiga (Mekokoesra, 2008). Pada tahun 2007, BPS mencatat bahwa pariwisata berdampak menyerap 5,22% kesempatan kerja, berkontribusi 1,62% terhadap produk nasional, 4,62% terhadap pajak nasional, 4,29% dampak terhadap nilai tambah sektoral. Namun demikian pembangunan pariwisata masih didominasi oleh pemilik modal (misalnya kasus di Bali, 80% investor asing) sedangkan masyarakat lokal hanya jadi penonton dan termarginalkan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Masalahnya adalah bagaimana masyarakat yang bergabung dalam koperasi dalam melaksanakan secara optimal dan efektif dalam pengusahaan dan pengelolaan pariwisata. Bagaimanakah koperasi wisata dapat dikembangkan melalui koperasi atau masuk sebagai bagian unit usaha di koperasi dan bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam koperasi. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana mengoptimalkan peran koperasi dalam kepariwisataan yang member manfaat dengan tetap mempertimbangkan lingkungan dan peluang pasar. Hal ini terkait pula dengan peran masyarakat lokal melalui koperasi dapat menjadi pelaku dan memperoleh nilai tambah dari kegiatan kepariwisataan yang ada di wilayah kerja koperasi bersama anggota.

Salah satu tantangan dari pengembangan pariwisata dan pembangunan koperasi adalah kemauan politik pemerintah dan stakeholder kepariwisataan untuk bersama-sama mendukung pemikiran dan mengimplementasikan pengembangan koperasi berbasis wisata atau koperasi wisata. Dukungan pemerintah kepada koperasi yang bersedia mengelola kegiatan kepariwisataan dapat berupa fasilitasi kebijakan pengembangan koperasi wisata, peningkatan kapasitas SDM pengelola, pendampingan, penguatan pemodal, bantuan promosi, peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan bagi koperasi, serta memfasilitasi ter selenggaranya kemitraan usaha dengan stakeholder industri pariwisata.

Secara mikro dan operasional, koperasi diminta untuk berakap profesional dalam kegiatan kepariwisataan. Misalnya, kegiatan agrowisata pada

dasarnya merupakan agro industri yang dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, bukan hanya meningkatkan nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai tambah lainnya seperti rekreasi alam (ekowisata), nilai keindahan, estetika, nilai ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta nilai sosial lainnya, dalam arti menggerakkan partisipasi masyarakat dan lembaga ekonominya (koperasi). Dengan demikian, dalam agrowisata memiliki nilai-nilai ganda yang jika dikelola dengan baik akan memberikan nilai tambah yang besar (KUN, 1998; Alekodra, 2001; Sugandi, 1998). Yang diperlukan untuk membangun pariwisata termasuk didalamnya agrowisata ada empat unsur, yaitu waktu, uang, sumber daya, dan motivasi untuk berjualan. Kurangnya wisatawan asing ke Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2007 relatif tidak mengalami perubahan yang berarti. Dengan demikian, koperasi dalam mengelola agrowisata harus benar-benar serius dan memperhatikan aspek permintaan pasar agrowisata dari sisi perilaku dan kepuasan pengguna produk agrowisatanya, tidak hanya semata menyediakan produk ataupun sarana prasarana agrowisata. Artinya tidak cukup menyediakan sarana dan prasarana pariwisata, tetapi memperhatikan dan mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan yang berbasis kepuasan dan kenikmatan (pleasure).

Jika koperasi berkontribusi pada sektor pariwisata, berarti porsi kegiatan koperasi pada kepariwisataan dalam ukuran ekonomi makro semakin menunjukkan peningkatan. Dalam dua dasawarsa ini, pariwisata berada dan bergerak dalam posisi penghasilan devisa dengan pola yang hampir sama, sehingga cukup strategis dan menguntungkan bagi koperasi jika memusatkan kegiatan usaha pariwisata sebagai unitbagian usahanya. Selain memiliki daya tahan terhadap ekonomi, sektor pariwisata bisa diandalkan sekaligus menjadi potensi yang masih memerlukan optimalisasi pembangunan dan pengembangannya di Indonesia. Dengan demikian, peran koperasi dalam kepariwisataan diharapkan dapat pula mendorong pendapatan sector kepariwisataan dan kontribusi koperasi terhadap perekonomian secara makro. Secara makro, kegiatan pariwisata oleh koperasi memberikan nilai manfaat langsung dan tidak langsung bagi anggota, sehingga keberadaan koperasi memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian rakyat.

VI. Kesimpulan

1. Koperasi memiliki peluang dan terbuak kesempatan yang cukup luas untuk berperan dalam sektor energi dan pariwisata. Peluang ini dapat diraih dengan upaya maksimal dari koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan untuk mendapat kesempatan.
2. Koperasi perlu mempersiapkan diri dari aspek sumberdaya manusia profesional, kematangan finansial, dan kekuatan kelembagaan guna mendukung upaya pengusahaan dan pengelolaan sektor energi maupun pariwisata.
3. Dukungan pemerintah secara kognitif dan nyata terhadap koperasi diperlukan untuk mengakui keberadaan koperasi dalam pengusahaan dan pengelolaan sektor energi dan pariwisata agar mempermudah proses etaseterasiperas koperasi pada kegiatan-kegiatannya.
4. Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan koperasi perlu pro aktif mengambil peran dalam sektor pengusahaan dan pengelolaan energi dan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanel, Alfred, 1994. *Dual or Double Nature of Cooperative*. Dalam *International Handbook of Cooperative Organizations*. Vandenhooek & Ruprecht, Göttingen.
- Heliyanto, Bambang, 2006. *Konsep Desa Mandiri Energi*. Prosiding Lokakarya Nasional II Inovasi Teknologi Jarak Pagar untuk Mendukung Program Desa Mandiri Energi. Biyusmedia Publishing. www.baitas.klatendesa.go.id/nd/images/jarakpagarkonsep_dne.pdf
- Inkepp, E., (1984). *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold, USA.
- Marongin, E. P., 1998. *Sustainable Tourism Development: A Case Study of Tourism Development in Karimunjawa Marine National Park, Jepara, Central Java, Indonesia*. Thesis, Bournemouth University, Bournemouth, England.
- McIntyre, G., 1993. *Sustainable Tourism Development: Guide For Local Planners*. WTO, Madrid.
- Middleton, V. T. C., & Hawkins, R., 1996. *Sustainable Tourism: A Marketing Perspective*. Butterworth-Heinemann, Oxford.
- Pigg, S.J. & R.K.Dowling, 2002. *Ecotourism*. Prentice Hall, Essex.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT PLN (Persero) dengan Koperasi atau Badan Usaha Lain, tertanggal 23 Maret 2009.
- Pitana, I G., 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologi terhadap Struktur, Sistem, dan dampak pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Presiden Republik Indonesia, 2009. *Sambutan Presiden Republik Indonesia pad ahari koperasi ke-62*, Semarang, 3 Juli 2009. (www.detik.com/download.asp).
- Piyono dan Purnama, 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi CGS*. Jakarta.
- Ropke, Johan, 1985. *The Economic Theory of Cooperative Enterprises in Developing Countries. With Special Reference to Indonesia*. Marburg.
- Sharpey, Richard & Julia, 1987. *Rural Tourism: An Introduction*. Thomson Business Press, London.
- Smith, V.I. & Eadington, W.R., 1998. *Tourism Alternatives: Potential and Problems in the Development of Tourism*. John Wiley & Sons, England.
- Spillar, J. Smith, 1994. *Ekonomi Pariwisata*.
- Suwantoro, Gamal, 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- Syamtu, Y., 2001. "Penerapan ERTA Perencanaan pada kawasan wisata, studi kasus di kawasan Agrowisata di Pondok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta". Jakarta: LPJ/M STP Tri Sakti, Jurna Ilmiah, Vol 5, No. 3 Maret 2001.
- Utama, I G.B. <http://babankuiah.wordpress.com/2009/05/02/pariwisata-keajaiban-ekonomi-dan-ekonomi/>
- Ajipri Gesti. *Kesempitan koperasi dalam Usaha Ketenagalistrikan*. (www.ajipri.net.com/article/53101energi-terbentuk-renewable).
- Wahjo, Saah, 1975. *Tourism Management*. London: Tourism International Press.
- Wood, Megan Epler, 2002. *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability*. UNEP, France.
- WTO. (1993). *Sustainable Tourism Development: Lesson for Planners*. WTO, Madrid.
- Wylie, J., 1995. *Tourism and The Environment*. University of Hawaii at Manoa, June 24, 1997.
- Yuyun, Wirasemita, 1996. *Fungsi Obyektif Koperasi Kogni*.
- Riwayat Penulis**
Dr. Ir. H. Erry Supriyati R., MT., adalah Dosen Tetap YPK (Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)).
Agus Artita, Dosen Tetap YPK (Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)).

eksplorasi

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.ikopin.ac.id Internet Source	4%
2	kholidug.blogspot.com Internet Source	4%
3	lestarieb.wordpress.com Internet Source	3%
4	digilib.upi.edu Internet Source	3%
5	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
6	harisandrianto.wordpress.com Internet Source	1%
7	118.97.150.18 Internet Source	1%
8	aiujanvierr.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%